



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



Tata kelola sumberdaya pertanian berbasis kelompok tani tanaman pangan di kabupaten Pasaman Barat

Saridin Saridin^{1*)}, Endry Martius², Hasnah Hasnah³

¹ Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Apr 17th, 2022

Revised May 22th, 2022

Accepted June 28th, 2022

Keyword:

Agricultural resources

Agriculture

Internal

External

Farmers

ABSTRACT

Most of the rural population depend on agriculture for their livelihood. Indonesia is a country that has vast agricultural land. Based on data from the Central Statistics Agency in 2016, for rice fields in Indonesia reached 8.19 million hectares. Population census data shows the number of rural residents is 50.21% (BPS, 2010). West Pasaman Regency from Agricultural Statistics data for five years from 2020 to 2016 has an average planting area of 78,950 hectares of food crops. Great potential in agriculture, of course, this requires the support of agricultural resources for food crops at the farmer group level which are sufficient and easy to obtain to support food crop farming at the farmer group level in West Pasaman Regency. Agricultural resources in the form of internal resources and external resources. Internal resources are all resources that are controlled or owned by farmer groups, while external resources are agricultural resources for food crops originating from outside the farmer groups, namely government resources and private resources. How farmer groups can obtain, use, and how farmer groups can return or account for food crop agricultural resources at the farmer group level in West Pasaman Regency.



© 2022 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Saridin, S.,

Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: tuankumudosaridin@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan yang dititikberatkan pada pertumbuhan ekonomi berimplikasi pada pemusatan perhatian pembangunan pada sektor-sektor pembangunan yang dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Tujuan pembangunan nasional mencakup beberapa aspek yaitu pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan masyarakat dan kesempatan kerja serta kelestarian sumberdaya yang potensial (Dzikrillah, 2017). Maka, salah satu indikator keberhasilan pembangunan di Indonesia menuntut kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak dan peranan masing-masing sektor. Salah satu sektor yang diharapkan dapat menunjang tujuan pembangunan ekonomi adalah sektor pertanian di pedesaan.

Pembangunan ekonomi pertanian di wilayah pedesaan idealnya dijadikan sebagai fokus dan target pembangunan. Sebab, sebagian besar penduduk di Indonesia bermukim di perdesaan dan mayoritas masih dalam kondisi miskin. Kenyataan lain yang harus diakui bahwa sektor pertanian di wilayah pedesaan sebagian besar dikelola oleh petani dengan skala usaha yang relatif sempit. Skala usaha pertanian yang kecil menghambat petani meningkatkan pendapatannya sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Kondisi masyarakat petani yang miskin selain luas usahatani yang sempit, juga disebabkan oleh produktivitas yang

rendah, infrastruktur terbatas, aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi, dan pasar serta rendahnya kapasitas petani. Di sisi lain, petani mempunyai sedikit kesempatan untuk memanfaatkan waktu luang bagi usaha di luar pertanian (Anantanyu, 2009).

Senada dengan itu, menurut Yustika (2013) faktor penyebab kerentanan wilayah perdesaan antara lain dicirikan oleh terbatasnya infrastruktur ekonomi, sedikitnya kesempatan kerja di luar pertanian (non-farm), jauh dari pasar, sulit mendapatkan akses ke sumber permodalan dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Reed (1979) kemudian menawarkan dua alternatif untuk mengatasi permasalahan ini yaitu: (a) konsolidasi lahan usahatani menjadi usaha yang lebih luas, dan (b) memperluas skala pengelolaan dan penggunaan sumberdaya usahatani tanpa mengubah pemilikan petani, melalui usahatani korporasi atau kelompok. Dua point penting yang diutarakan Reed tersebut bermuara pada upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani dan daya saing petani.

Tercapainya produktivitas, efisiensi usahatani dan daya saing petani perlu dilakukan pengelolaan sumberdaya pertanian yang tepat sasaran. Namun, pengelolaan sumberdaya pertanian dihadapkan pada permasalahan struktural dan permasalahan kultural. Permasalahan struktural menyangkut faktor-faktor eksternal yang kurang mendukung, seperti rendahnya teknologi yang diterapkan, terbatasnya akses modal, kelembagaan dan manajemen, kurangnya dukungan pemasaran, dan kelembagaan yang tidak mendukung. Sedangkan permasalahan kultural ditandai oleh ciri masyarakat Indonesia yang tingkat karsanya relatif rendah terutama diperani oleh "budaya lunak" yang dicirikan: tidak adanya orientasi ke depan, tidak adanya keyakinan terhadap hari esok yang lebih baik, cepat menyerah, refreutism (lebih berorientasi pada akherat), dan lamban (Anantanyu, 2009). Artinya, permasalahan pengelolaan sumberdaya pertanian semakin kompleks karena menyangkut pengaturan masukan dan keluaran dalam proses produksi pertanian. Untuk memaksimalkan pengelolaan sumberdaya pertanian, petani tidak hanya menguasai pengetahuan dan keterampilan yang memadai mengenai Praproduksi dan teknik budidaya pertanian, tetapi juga harus memahami kondisi alam, manusia (SDM) dan sistem yang mengaturnya.

Beberapa pandangan dari berbagai hasil penelitian menyebutkan alternatif jalan keluar atas permasalahan pengelolaan sumberdaya pertanian. Misalnya untuk dapat mencapai produktivitas dan efisiensi yang optimal petani harus menjalankan usaha bersama secara kolektif dengan petani lain. Sebab, secara tradisional, kelembagaan masyarakat petani sudah berkembang dari generasi ke generasi, namun tantangan jaman menuntut suatu kelembagaan yang lebih sesuai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat petani. Maka, idealnya, dalam pengembangan kelembagaan pertanian, petani-petani kecil diarahkan untuk bergabung secara kolektif dalam kelompok-kelompok, organisasi atau kelembagaan agar menjadi satu unit kekuatan produksi yang besar, tangguh dan memiliki produktivitas tinggi. Penumbuhan kelompok-kelompok sekunder masyarakat tani ini, selain meningkatkan produktivitas usaha juga meningkatkan efisiensi usaha pertanian.

Kelembagaan petani diakui sangat penting dalam pembangunan pertanian dimana diharapkan mampu membantu petani keluar dari persoalan kesenjangan ekonomi, yang sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal. Menurut Slamet (2003) kelembagaan pertanian kurang menempatkan petani sebagai pengambil keputusan dalam usahatannya, karena dominasi intervensi pihak luar petani terhadap kelompok tani. Pengembangan kelembagaan melalui penyuluhan pertanian misalnya justru menempatkan petani pada berbagai kelompok binaan yang dibentuk untuk kepentingan tertentu, sehingga posisi petani lemah dalam pengambilan keputusan kelompok. Kurang berhasilnya proyek-proyek pertanian yang berorientasi pada pembangunan kelembagaan petani, seperti KUD, corporate farming, dan kelompok-kelompok usaha bersama yang lain menunjukkan masih perlu kajian yang mendalam terhadap kelembagaan petani. Kondisi ini sesuai dengan paparan Suryana (2007) dimana salah satu hambatan implementasi revitalisasi pertanian di Indonesia adalah tidak adanya organisasi ekonomi petani yang kokoh sebagai salah satu ciri pertanian modern. Faktor penyebab ketidakberlanjutan kredit atau dana bergulir ini karena pengelolaan modal usaha sektor pertanian relatif lebih berisiko dibandingkan dengan pengelolaan modal usaha non-pertanian. Menurut Marimin dan Maghfiroh (2010) pemicu ketidakberlanjutan program tersebut adalah semakin membengkaknya hutang debitur dan tingginya kredit yang macet. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik produk dan bahan baku pertanian yang mudah rusak (perishable), mengambil tempat banyak (voluminous), kamba (bulky), dan bersifat musiman (seasonal). Selain karakteristik tersebut, sifat-sifat dari proses produksi pertanian dan penanganan pasca panen banyak dipengaruhi oleh kondisi alam, serta sifat biologi dan sifat kimiawi tanaman atau ternak yang sebagian besar belum dapat dikendalikan sepenuhnya oleh manusia (Padangaran, 2013).

Implikasi dari berbagai permasalahan tersebut, pemerintah pusat maupun daerah melalui program-programnya berupaya mendukung tata kelola pertanian dengan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok tani. Bantuan-bantuan tersebut dapat diakses melalui mekanisme kelompok tani dalam bentuk sarana produksi seperti benih, permodalan, subsidi sarana produksi pertanian, bantuan alat mesin pertanian mulai dari pratanam, tanam, panen, paska panen hingga pengolahan hasil pertanian.

Selain pemerintah, pihak swasta seperti lembaga keuangan (bank dan koperasi) dan pengepul (toke) juga banyak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu kegiatan pertanian di Kabupaten Pasaman Barat. Namun demikian tidak semua petani yang tergabung di dalam kelompok tani dapat memaksimalkan dukungan sumberdaya tersebut karena tata kelola sumberdaya yang belum mapan dan kurangnya pemahaman petani dalam hal teknis dan prosedural. Dalam hal tata kelola dukungan pembiayaan misalnya dapat dilihat dari kemampuan petani dalam memperoleh, menggunakan dan mengembalikan atau mempertanggungjawabkan modal yang diberikan. Menurut Kasmir (2004) sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu melakukan analisis pembiayaan. Jika dilihat dari sumber modal yang digunakan dalam pembiayaan oleh pihak bank, paling tidak ada dua bentuk dasar modal perusahaan yakni pinjaman dan kekayaan atau dana pribadi (Brigham dan Gapenski, 1991). Oleh karena itu, modal usaha dapat diperoleh dari dua sumber yaitu modal sendiri dan modal dari luar seperti investor, perbankan, lembaga-lembaga pemberi kredit non-bank, hibah pemerintah, dana CSR (Corporate Social Responsibility), dana zakat, infaq, shodaqoh, dan wakaf (Kementerian Koperasi dan UKM RI 2016). Berdasarkan jenisnya, pembiayaan digolongkan menjadi pembiayaan berbunga dan pembiayaan tanpa bunga (Sukardi, 2019) dan perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada cara dan proses memperoleh hasil (Orgianus, 2005).

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah pertanian yang juga mendapat dukungan dari pemerintah maupun pihak swasta. Potensi yang dimiliki Kabupaten Pasaman Barat dimana pada tahun 2019 sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang sebesar 40.97% PDRB di samping sektor-sektor lainnya. Sementara sektor pertanian sendiri menyumbang sebesar 80.29% PDRB dan sub sektor tanaman pangan memberikan kontribusi sebesar 28.83% PDRB. Potensi lain seperti lahan pertanian dengan luas wilayah 388.786 Ha yang terdiri dari lahan sawah 13.105 Ha lahan bukan sawah 330.602 Ha. Potensi lahan tersebut juga didukung oleh keberadaan kelembagaan petani dengan jumlah kelompok tani sebanyak 1475 kelompok, 99 Gabungan Kelompok Tani, dan 23 Kelembagaan Ekonomi Petani Pangan. Kelompok tani sebagai wadah koordinasi sekaligus wahana belajar bagi petani dalam melakukan kegiatan usahatani dinilai lemah dalam mengelola sumberdaya-sumberdaya pertanian baik yang bersumber dari pemerintah maupun swasta. Lemahnya kelembagaan petani ini disinyalir karena faktor internal dan faktor eksternal kelembagaan sehingga akses terhadap dukungan sumberdaya pertanian terutama dukungan eksternal yang tidak diperoleh dengan maksimal. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana tata kelola sumberdaya pertanian di tingkat kelompok tani di Kabupaten Pasaman Barat?

Metode

Penelitian dilakukan Penelitian akan dilakukan di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat di tujuh kecamatan yakni Kecamatan Pasaman, Kecamatan Lembah Melintang, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali, Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Talamau dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Waktu penelitian dilakukan dari Bulan Oktober 2020 sampai dengan Februari 2021. Pokok bahasan penelitian adalah tentang bagaimana kelompok tani di Pasaman Barat telah melakukan pengelolaan dan pendayagunaan sumberdaya pertanian untuk usahatani pangan. Penelitian ini berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat berbasis Kelompok tani tanaman pangan ditinjau dari tata kelola sumberdaya pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola sumberdaya pertanian di Kabupaten Pasaman Barat.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, penelitian ini didesain sebagai penelitian kombinasi/*hybrid* antara penelitian kuantitatif dan penelitian secara kualitatif. Kombinasi metode penelitian yang digunakan adalah Studi kasus (wawancara dengan Informan Kunci) dengan 4 kategori informan kunci (Perbankan, Penyuluh, Petani, Toke) yang didukung dengan strategi survei eksploratoris sekuensial, dimana metode kualitatif dikombinasikan dengan menggunakan metode kuantitatif untuk sub tujuan tertentu di dalam penelitian. Dengan metode campuran juga dimungkinkan didapatkan pemahaman yang lebih luas terhadap masalah-masalah penelitian.

Penelitian ini berfokus pada pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan berbasis kelompok tani tanaman pangan ditinjau dari tata kelola sumberdaya pertanian dan faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola sumberdaya pertanian di Kabupaten Pasaman Barat. Ruang lingkup tata kelola sumberdaya pertanian di Kabupaten Pasaman Barat dalam penelitian ini, meliputi aspek: memperoleh sumberdaya pertanian, menggunakan sumberdaya pertanian dan mempertanggungjawabkan sumberdaya pertanian. Populasi target dari penelitian ini adalah petani yang tergabung di dalam kelembagaan kelompok tani di Kabupaten Pasaman Barat. Populasi kelompok tani di Pasaman Barat berjumlah 1.471, yang terbagi dalam 4 kategori/kelas: pemula (1240), lanjut (211), madya (11) dan utama (0). Populasi dalam penelitian ini adalah pengurus atau anggota kelompok tani sebanyak 52 kelompok tani masing-masing kelompok diwakili oleh 1

(satu) orang pengurus atau 1 (satu) orang anggota kelompok tani tersampel. Pupulasi tersebar dalam kabupaten Pasaman Barat di ambil secara acak dari 11 (sebelas) kecamatan, kemudian pengurus atau anggota kelompok tani diambil dari kelompok tani tersampel untuk dijadikan sampel dalam penelitian ini. Jumlah kelompok tani tanaman pangan per kecamatan disajikan berturut-turut dapat dilihat pada tabel 2. Adapun untuk mengetahui besarnya sampel dapat digunakan rumus Slovin sebagai berikut: $n = \frac{N}{1+Ne^2}$.

Hasil dan Pembahasan

Proses dan tahapan pengelolaan sumber daya pertanian tanaman pangan dapat diamati dari tiga kegiatan utama yakni kegiatan Praproduksi, kegiatan produksi dan kegiatan Pascaproduksi.

Praproduksi

Kegiatan Praproduksi dalam dukungan internal terkait pengelolaan sumberdaya pertanian di sembilan kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yaitu, motivasi berusaha, luas lahan, status kepemilikan lahan dan alat bantu tanam.

1. Motivasi berusaha tani

Secara umum dari hasil penelitian ini diperoleh gambaran motivasi utama kelompok tani tanaman pangan di kabupaten Pasaman barat adalah motivasi karena kebutuhan, maksudnya kelompok tani berusaha tani didorong oleh kebutuhan sumber pendapatan utama mereka adalah dari usaha tani tanaman pangan, didapatkan gambaran hasil dimana sebanyak 66 % dari responden melakukan kegiatan usahatani didasari faktor kebutuhan, artinya kelas pemula belum memiliki orientasi bisnis. Sedangkan kelompok tani dengan kelas lanjut sudah memiliki orientasi bisnis meskipun masih lebih rendah dibandingkan kelompok tani madya. Dari halini dapat disimpulkan secara empiris semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin tinggi orientasi bisnisnya dalam menjalankan usahatani tanaman pangan.

Usahatani yang dilakukan setiap petani beragam tergantung dari jenis usaha dan apa yang diusahakannya. Menurut Dzikrillah (2017) apabila dorongan tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga baik melalui atau tanpa peredaran uang, maka usahatani yang demikian disebut usahatani untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Subsistence Farm). Sedangkan bila motivasi yang mendorongnya untuk mencari keuntungan, maka usahatani yang demikian disebut usahatani komersial (Commercial Farm). Sejalan dengan tujuan dan motivasi tersebut, Soekartawi (1986), menyatakan bahwa ciri petani komersial adalah; (1) cepatnya adopsi terhadap inovasi, (2) cepat mobilitas pencarian informasi, (3) berani menanggung resiko dalam berusaha, (4) memiliki sumberdaya yang cukup. Sedangkan ciri petani subsisten adalah kebalikannya. Akan tetapi dengan teknologi serta kemajuan pembangunan yang hampir merata ke berbagai pelosok daerah, petani tidak lagi mengusahakan usahatannya secara subsisten melainkan semi subsisten (setengah subsisten dan setengah komersial). Perubahan tersebut diantaranya disebabkan oleh perkembangan teknologi yang semakin maju dalam hal produksi sehingga mempermudah pekerjaan petani.

2. Luas lahan

Luas area lahan yang diusahakan juga menjadi bagian penting dalam faktor Praproduksi. Petani yang tergabung di dalam kelompok tani memiliki luasan area yang bervariasi.

Secara dominan luas lahan disetiap kelas kelompok tani sama yaitu 0,5 sampai dengan 1 (satu) hektar. Berdasarkan hasil pengolahan data didapatkan empat kategori luas areal lahan masing-masing responden. Sebanyak tujuh orang atau sekitar 13 % petani memiliki luas lahan kurang dari 0.5 Ha. Sebanyak 11 petani atau sebesar 21 % memiliki luas lahan antara 1-1.5 Ha dan sebanyak 13 orang (25 %) petani memiliki luas lahan lebih dari 1.5 Ha. Luasan lahan petani paling tinggi antara yakni 0.5-1 Ha dimiliki sebanyak 21 orang responden (40 %). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menguasai lahan yang relatif sempit. Secara klasifikasi kelompok dari tabel delapan diatas dapat di jelaskan bahwa semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin luas lahan yang dikelola kelompok tani dan hanya kelompok pemula yang memiliki lahan dibawah 0,5 hektar.

Kondisi luasan lahan salah satu faktor yang menentukan besar kecilnya pembiayaan yang dikeluarkan. Semakin luas lahan yang dikelola maka akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian penting dalam melihat bagaimana tata kelola pembiayaan dilihat dari sebaran luas lahan yang dimiliki petani. Dalam hasil wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata luas lahan untuk budidaya tanaman pangan di Kabupaten Pasaman Barat belum menjadi prioritas sebab petani lebih mengutamakan dan dominan pada usaha perkebunan kelapa sawit. Hal ini menyebabkan budidaya tanaman pangan hanya sebagai prioritas kedua.

3. Status kepemilikan lahan

Status kepemilikan lahan dikategorikan menjadi empat kategori yakni petani pemilik, penggarap, penyewa dan pemilik penggarap. Dari hasil olah data ditemukan sebesar 60 % atau sekitar 31 orang petani berstatus sebagai pemilik sekaligus penggarap. Sementara petani penggarap sebesar 19 % atau sekitar 10 orang. Sisanya, sebagai pemilik 17.2 % (9 orang) dan petani penyewa hanya 2 orang (3.8 %). Data tersebut menjelaskan bahwa secara dominan petani berstatus sebagai pemilik sekaligus penggarap. Hanya sebagian kecil saja petani yang menyewa lahan untuk budidaya tanaman pangan. Beberapa alasan yang mengemuka di lapangan ditemukan bahwa petani cenderung memanfaatkan lahan milik sendiri atau lahan yang diwariskan keluarga untuk kegiatan pertanian. Jikapun ingin membeli dan menyewa lahan, petani rata-rata telah punya lahan milik sendiri. Secara klasifikasi kelompok kepemilikan lahan dapat dilihat pada tabel 10 berikut;

Jadi, kesempatan untuk menyewa dan atau membeli adalah opsi berikutnya. Namun, beberapa petani lain memilih untuk menyewa dengan alasan tidak ada lahan yang bisa digunakan untuk usaha. Petani pemilik sekaligus penggarap lahan paling dominan dan tidak dipengaruhi kemampuan kelas kelompok tani, artinya kelompok tani pemula, kelompok tani lanjut dan kelompok tani madya sama memiliki lahan yang diatas lima puluh persen dikelola sendiri. Dapat dijelaskan juga berdasarkan tabel sembilan diatas semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin mandiri kelompok tani dalam kepemilikan lahan yang dikelola.

Di lapangan juga diketahui model sewa lahan tidak terlalu kaku yang artinya ketentuan yang mengikat antara pemilik lahan dan penyewa lahan cenderung lebih fleksibel. Fleksibelitasnya terlihat dari biaya sewa dan besaran biaya yang dibayarkan. Biaya sewa yang dikeluarkan kadang setengah dari harga sewa yang standard dan waktu pembayaran sewa kadang bisa dilakukan setelah panen.

4. Alat bantu tanam

Aspek lain yang juga bagian dari dukungan internal petani di dalam kelompok tani ialah alat tanam yang digunakan. Sebanyak 38 atau sekitar 73 % responden tidak menggunakan alat tanam. Artinya, petani melakukan penanaman secara manual. Dalam kegiatan penanaman jagung misalnya petani cenderung menggunakan tugal dibandingkan dengan alat atau mesin tanam. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, petani di dalam kelompok tidak menggunakan alat tanam karena tumbuh benih yang tidak merata karena alatnya disaat penanaman tersumbat lobang keluar benihnya oleh tanah sehingga tidak semua lobang terisi oleh benih khususnya pada alat tanam jagung dari kletek. Berbeda dengan cara tanam manual menggunakan tugal dimana tumbuh benih lebih merata karena yang memasukkan benih ke lobang tugal langsung oleh orang. Dari 52 responden hanya 14 orang atau sekitar (27 %) yang menggunakan alat tugal menggunakan kletek. Secara lebih rinci sebaran penggunaan alat tanam yang digunakan berdasarkan klasifikasi kelompok tani.

Tanpa menggunakan alat tanam lebih dominan dibandingkan dengan menggunakan alat tanam dan berlaku sama pada semua tingkatan klasifikasi kelompok tani. Penggunaan alat tanam pemerintah hanya pada dimanfaatkan kelompok kelas lanjut saja sedangkan Kelompok tani Kelas pemula dan kelompok tani madya masih menggunakan alat tanam sewa dari swasta seperti dapat kita lihat pada tabel 11 diatas.

Penggunaan alat bantu taman menjadi pertimbangan dalam kegiatan Praproduksi sebab terkait dengan biaya upah yang dikeluarkan. Sebagai perbandingan penggunaan alat tanam dalam komoditi jagung misalnya terdapat perbedaan margin yang signifikan. Biaya upah yang dikeluarkan petani dengan menyewa alat bantu tanam berkisar antara Rp. 180.000-Rp 200.000 per kantong (5 kg benih jagung). Sementara menggunakan tugal manual membutuhkan biaya tenaga kerja harian yang mana untuk tenaga kerja perempuan sebesar Rp. 80.000 per orang/hari dan laki-laki sebesar Rp. 100.000 per orang/hari. Sebagai gambaran untuk 10 kg benih jagung dibutuhkan sebanyak dua orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Perbandingan kebutuhan tenaga kerja dengan cara tanam manual 1:2 dimana satu orang laki-laki sebagai tukang tugal dan diiringi dua orang perempuan untuk membenih. Jadi, kalkulasi matematis, untuk 10 kg benih jagung menggunakan alat tanam (kletek) membutuhkan biaya lebih kurang Rp.360.000-Rp.400.000.

Sementara dengan cara tanam manual mengeluarkan biaya Rp. 520.000. Jadi perbedaan biaya yang dikeluarkan untuk kedua cara tanam tersebut sebesar Rp. 120.000 sampai Rp. 160.000. Nilai ini tentu menjadi pertimbangan bagi petani sebab kedua cara tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dengan cara tanam manual, petani merasa diuntungkan dengan sebaran yang merata setiap titik tanam, sementara menggunakan alat tanam dengan mesin kletek, kendati murah namun tidak menjamin sebaran yang merata di setiap titik tanam. Pada beberapa kasus, satu titik tanam bisa

terisi lebih dari empat benih dan hal tersebut merugikan petani dari sisi benih dan jikapun tumbuh maka tidak akan tumbuh dengan baik.

Produksi

Tahapan produksi adalah pengelolaan sumberdaya pertanian yang menyangkut pengaturan proses produksi dalam kegiatan usahatani tanaman pangan berbasis kelembagaan kelompok tani. Dalam penelitian ini kegiatan produksi dalam dukungan faktor internal terkait pengelolaan sumberdaya pertanian di Kabupaten Pasaman Barat diwakili dengan beberapa butir pertanyaan diantaranya pemanfaatan tenaga kerja, pengolahan lahan, penanaman, pengendalian gulma, komoditi yang diusahakan, pola tanam dan keterampilan berusahatani.

1. Pemanfaatan tenaga kerja,

Dukungan sumberdaya pertanian berupa tenaga kerja dalam kegiatan produksi dikategorikan menjadi empat macam yakni: keluarga, upahan, julo-julo (arisan bergilir) dan gotong royong. Berdasarkan pengisian data dari kuesioner tenaga kerja upahan menjadi pilihan responden dalam kegiatan usahatani yang dilakukan. Sebanyak 49 responden atau sekitar 94.2 % mengandalkan buruh atau pekerja harian untuk kegiatan usahatani mereka. Sementara hanya 3 orang atau 5.8 % yang menggunakan tenaga kerja melalui sistem *julo-julo*. Dari 52 orang responden tidak ada pilihan untuk menggunakan tenaga kerja dari keluarga atau dengan sistem gotong-royong. Dengan sistem budaya yang masih kental dengan tradisi gotong royong, masyarakat petani di Kabupaten Pasaman Barat yang selama ini diasumsikan lebih mengandalkan tenaga kerja keluarga sudah tidak relevan lagi. Jikapun harus menggunakan tenaga kerja dari luar anggota keluarga, biasanya menggunakan sistem arisan bergilir. Menurut pemaparan beberapa petani di lapangan, hal ini bertujuan selain menghemat biaya tenaga kerja juga untuk tetap menjaga kekompakan dan kedekatan dengan petani lainnya. Dukungan tenaga kerja upahan secara bersamaan pada setiap level kelompok tani mendominasi dibandingkan dukungan tenaga kerja lainnya, sedangkan dukungan tenaga kerja keluarga, tenaga kerja julo – julo dan tenaga kerja gotong royong tidak ada pada kelompok tani madya, hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin individualistik kelompok tani dalam mengerjakan usaha taninya pada tahapan praproduksi yang sumber biaya tenaga kerjanya diperoleh dari koperasi dan sebagian modal mandiri. Dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin tinggi pembiayaan tenaga kerja dan semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin rendah pembiayaan untuk kebutuhan saporodinya. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa semakin rendah klasifikasi kelompok tani maka semakin tinggi semangat kekeluargaan dan semangat gotong royongnya, sebaliknya semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin rendah semangat kekeluargaan dan semangat gotong royong, artinya juga semakin tinggi kelas kelompok tani semakin banyak kelompok tani mendapatkan fasilitasi pembiayaan untuk anggotanya dan artinya semakin tinggi tingkat kepercayaan pihak eksternal terhadap kelompok tersebut. Jika ditelaah secara teoritis, sistem upah harian menurut Zainal dan koleganya (2014) pemilik lahan bisa menambah atau mengatur pekerjaan. Walaupun, tidak ada kesepakatan apapun diawal. Sistem ini biasanya dilakukan oleh pemilik lahan yang ingin menggarap lahan yang lebih luas, banyak faktor yang menyebabkan para pemilik menerapkan sistem pengupahan ini. Salah satunya yaitu faktor efisiensi, keefektifan serta kemudahan dalam pemberian upah pekerja itu sendiri. Sehingga para pemilik lahan dapat menentukan besaran upahnya berdasarkan kemampuan dan hitungannya secara harian.

2. Pola tanam

Dilihat dari pola tanam yang dilakukan petani dalam kelompok tani dalam satu kali musim tanam, tampak tiga belas variasi yang digunakan, namun yang dominan ada enam pola tanam, secara lebih rinci sebaran pola tanam berdasarkan klasifikasi kelompok tani dapat kita lihat pada tabel 14. Pola tanam Padi- Jagung-Padi - Jagung-jagung (Pola 5), digunakan kelompok tani lanjut sebesar 25 % diikuti oleh kelompok tani pemula sebesar 23 % sedangkan kelompok tani madya tidak memiliki pola tanam Padi- Jagung-Padi- Jagung-jagung (Pola 5).

Namun kelompok tani madya lebih dominan pada pola satu (Padi-Padi) dan pola 7 (Jagung – Jagung – Jagung) artinya kelompok tani madya lebih fokus kepada sistem budidaya monokultur dari pada sistem budidaya polikultur, hal ini sejalan dengan motivasi berusaha tani kelompok tani madya telah memiliki orientasi bisnis sedangkan kelompok tani pemula dan kelompok tani lanjut belum memiliki orientasi bisnis. Jadi Semakin tinggi motivasi bisnis dalam berusaha tani maka semakin fokus kelompok tani kepada usaha tanaman pangan sejenis dilahan usaha taninya.

Hasil pengamatan langsung di lapangan, pola tanam yang dilakukan petani relatif bervariasi. Untuk lahan sawah, di beberapa lokasi penelitian petani menggunakan pola tanam padi-jagung-padi.

Sementara di lahan kering yang bukan sawah petani cenderung menanam dengan pola jagung-jagung-palawija. Hasil wawancara di lapangan dengan petani diketahui bahwa pola tanam yang mereka terapkan tergantung beberapa alasan diantaranya, harga jual komoditi di pasaran dimana petani akan menanam jagung jika harga mahal, sebaliknya petani akan beralih ke jenis komoditi palawija lainnya jika harga jualnya lebih menguntungkan.

3. Keterampilan berusaha tani.

Bagaimana kelompok tani meningkatkan keterampilan dalam berusaha tani mereka adalah dari berbagai sumber informasi yang didapat baik dari internal kelompok tani maupun dari eksternal. Melalui kuesioner penelitian, aspek sumber informasi berusaha tani dikelompokkan menjadi empat kategori yakni pengetahuan sendiri, membaca buku, pembinaan/penyuluhan dan kombinasi dengan faktor lain seperti media sosial, televisi, youtube. Berdasarkan hasil olah data diperoleh sumber informasi petani dalam kelembagaan kelompok tani sebanyak 46 orang atau sekitar 86.8 % memperoleh informasi dari pembinaan atau penyuluhan. Berikutnya 27 orang atau 50.9 % didapat melalui kombinasi berbagai sumber informasi, 25 orang atau sekitar 47.2 % berdasarkan pengalaman dan pengetahuan sendiri dan 14 orang atau 26.4 % bersumber dari membaca buku.

Sumber informasi pengetahuan keterampilan berusaha tani yang paling mencolok adalah pada kelas kelompok tani pemula yang menyatakan 52 % sumber informasinya adalah diperoleh dari penyuluh sedangkan kelompok tani lanjut memperolehnya dari berbagai sumber secara merata dan secara seimbang kelompok tani madya memperoleh informasi dari empat sumber saja yaitu kemampuan sendiri, membaca buku, whatsapp dan youtube. Artinya disini peran dan fungsi penyuluh dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani sudah berjalan.

Menurut Sadono (2012) jenis-jenis informasi pertanian yang diharapkan petani melalui sumber informasi antara lain: (1) informasi tentang pengetahuan dan ketrampilan teknis usahatani, (2) informasi harga sarana pertanian, (3) informasi harga produk pertanian, khususnya padi, (4) informasi keberhasilan petani di daerah lain yang menerapkan teknologi baru.

4. Pengolahan tanah

Tahap awal dalam kegiatan usahatani ialah tahap pengolahan lahan. Pengolahan lahan menjadi penting karena kondisi lahan yang tidak maksimal berpengaruh terhadap hasil komoditas yang ditanam. Kegiatan pada tahap ini meliputi hal-hal seperti pembersihan gulma, pembajakan, mencangkul, pemberian pupuk dasar, membuat bedengan dan kegiatan lain yang disesuaikan dengan jenis komoditas yang diusahakan. Dari data yang diperoleh tahapan persiapan lahan dikategorikan menjadi tiga kegiatan yakni pengolahan lahan secara sempurna, tidak melakukan pengolahan lahan dan pengolahan lahan dengan semi olah tanah. Dari hasil penelitian diperoleh data sebanyak 24 orang atau sekitar 46 % melakukan olah tanah secara sempurna dengan menggunakan mesin bajak. Sementara 22 orang atau 42 % responden tidak melakukan pengolahan lahan, sisanya enam orang (12 %) melakukan semi olah tanah dengan menggunakan paler.

Secara klasifikasi kemampuan kelompok tani berdasarkan data dapat kita jelaskan bahwa semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin rendah penggunaan herbisida dalam pengolahan tanah karena kelas madya tidak lagi melakukan sistem tanpa olah tanah (TOT), sedangkan kelompok tani pemula dan kelompok tani lanjut masih dominan menggunakan sistem TOT. Sedangkan Sistem semi olah tanah hanya dilakukan oleh kelompok pemula.

5. Penanaman

Penanaman dimulai dengan memilih komoditi yang diusahakan dari beberapa komoditi tanaman pangan. Jenis komoditi yang diusahakan menjadi salah satu faktor internal yang mendukung dalam pengelolaan sumberdaya pertanian. Petani yang tergabung ke dalam kelompok tani memiliki komoditi tanaman yang beragam. Dilihat dari komoditi, jagung menjadi komoditi yang banyak dibudidayakan petani yakni 43 orang atau sekitar 81 %, diikuti tanaman padi sebanyak 36 orang atau sekitar 67.9 %, kacang-kacangan sebanyak delapan orang (15.1 %) dan umbi-umbian sebanyak tiga orang atau sekitar 5.7 %. Hasil lain menunjukkan ada sekitar 28 orang petani atau sekitar 52.8 % melakukan penanaman komoditi secara bersamaan. Kondisi di lapangan menunjukkan di wilayah pertanian di Kabupaten Pasaman Barat dominan pada perkebunan kelapa sawit. Di beberapa kecamatan di Pasaman Barat (termasuk wilayah penelitian) mengandalkan perkebunan sawit sebagai usaha utama petani. Sementara budidaya tanaman pangan hanya sebagai usaha sampingan. Karena hanya sebagai usaha sampingan petani lebih dominan membudidayakan komoditi jagung sebab beberapa alasan diantaranya, usaha pengerjaan dinilai yang relatif lebih mudah, tidak terlalu banyak resiko dan harga jual yang relatif lebih stabil. Tanaman jagung adalah komoditi yang dominan diusahakan oleh setiap level kelas kelompok

tani dibandingkan dengan tanaman padi, namun pemanfaatan lahan secara bersamaan antara tanaman jagung dengan tanaman padi lebih banyak persentasenya dikelompok tani lanjut dan kelompok tani pemula dibandingkan dengan kelompok tani madya, artinya hal ini menggambarkan bahwa semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin fokus kepada sejenis tanaman pangan saja yang diusahakan atau sistem monokultur.

6. Pengendalian gulma

Gulma merupakan masalah serius yang dihadapi petani dalam kegiatan usahatani di Indonesia. Banyak faktor yang menentukan tingkat kompetisi antara tanaman dengan gulma, diantaranya jenis gulma, kerapatan, distribusi dan waktu kehadiran gulma serta kultur teknis tanaman. Kaitan antara teknik pengendalian gulma dengan topik penelitian beririsan pada biaya yang dikeluarkan petani dalam mengendalikan gulma. Asumsinya, semakin sering petani melakukan pengendalian gulma dengan herbisida maka penggunaan herbisida akan semakin banyak. Penggunaan herbisida yang tidak tepat dan berlebihan selain mempengaruhi kondisi tanah juga berpengaruh pada aspek pembiayaan yang juga semakin besar. Dengan kata lain, semakin intens dalam menggunakan herbisida maka akan menambah beban biaya herbisida dan upah dalam kegiatan usahatani.

Berdasarkan intensitas pengendalian gulma yang dilakukan petani. Responden yang melakukan pengendalian gulma dua kali lebih dominan yaitu sebanyak 30 responden atau sekitar 58 % selama satu masa tanam. Sementara sebanyak 12 responden (23 %) melakukan tiga kali pengendalian gulma selama satu masa tanam, sisanya sebanyak 10 orang petani (19 %) melakukan sekali pengendalian gulma selama satu kali masa tanam. Berdasarkan hasil pengamatan di lokasi penelitian, rata-rata petani melakukan pengendalian gulma sebanyak tiga kali yakni pada saat sebelum tanam, sebelum hingga dua bulan setelah tanam dan terakhir menjelang akan panen. Namun, intensitas ini tidak sepenuhnya dilakukan semua petani sebab untuk komoditas tertentu hanya dapat dilakukan dua kali atau bahkan lebih dari tiga kali selama satu kali musim tanam. Sementara dari cara yang digunakan untuk mengendalikan gulma, hasil pengamatan di lapangan menunjukkan, petani lebih sering menggunakan herbisida. Namun, untuk jenis tanaman tertentu seperti kacang-kacangan dan umbi-umbian, petani melakukan penyiangan gulma secara manual dengan cangkul atau tajak.

Gulma adalah organisme yang dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, menurunkan produksi usahatani tanaman pangan, sehingga perlu dilakukan penyemprotan untuk mengendalikannya. Tujuan penggunaan herbisida untuk menekan pertumbuhan gulma pengganggu tanaman baik sejak awal tanam maupun saat pertumbuhan tanaman penggunaan herbisida sistemik untuk usia gulma 15 sampai 25 hari setelah tanam dan herbisida kontak untuk gulma 45 sampai 60 hari setelah tanam khususnya komoditi jagung. Terkait dengan besarnya kebutuhan yang digunakan untuk tanaman. Volume penggunaan pestisida berbeda setiap petani, tergantung intensitas gulma yang ada pada lahan. Dari segi cara pengendalian gulma sebanyak 32 responden (61 %) menggunakan racun (herbisida) dan hanya delapan orang (15 %) yang tidak menggunakan racun dalam pengendalian gulma.

Pada prinsipnya kerugian yang ditimbulkan oleh gulma setara dengan kerugian yang diakibatkan oleh hama dan penyakit. Gulma menjadi masalah yang tetap, karena selalu menyaingi tanaman utama (pokok) dalam pengambilan unsur hara, air, cahaya dan tempat. Maka salah satu langkah untuk mengurangi gangguan gulma selain penggunaan herbisida menurut Wijaya (2017) adalah dengan sistem pertanian yang mempraktekan penanaman dalam barisan, monokultur, jarak tanam yang antar barisan, pemupukan, penggunaan alat-alat pertanian (mekanisasi), pengairan, sekaligus memberi peluang bagi gulma yang bermanfaat untuk tumbuh dan berkembang.

Pascaproduksi

Kegiatan pascaproduksi dalam dukungan sumberdaya pertanian tanaman pangan terkait pengelolaan sumberdaya pertanian di Kabupaten Pasaman Barat diwakili dengan pertanyaan tatacara pemasaran hasil serta sumber pembiayaan dalam kegiatan Pascaproduksi.

1. Tatacara pemasaran hasil pertanian tanaman pangan

Pemasaran hasil produksi diupayakan dengan mencari tingkat harga yang paling layak dan berkeadilan, sehingga memberikan keuntungan yang optimal bagi para petani, salah satunya gapoktan menampung hasil produksi para anggota dengan harga diupayakan di atas harga pasar. Berdasarkan hasil penelitian yang terangkum di didapatkan tatacara pemasaran hasil pertanian yang dilakukan petani di dalam kelompok tani.

Penganganan paska panen khususnya komoditi jagung secara umum diambil alih oleh toke mulai dari lahan sampai dengan prosesing perontokan dan pengeringan, biaya perontokan dengan cornseller dan

pengeringan ditanggung oleh petani. Khusus komoditi padi secara umum diambil langsung oleh pedagang kelokasi sawah petani dalam kondisi kering panen langsung ditimbang kemudian uangnya langsung diterima petani setelah padinya ditimbang. Berdasarkan hasil penelitian tergambar bagaimana peran kelembagaan petani dalam hal ini kelompok tani kelas pemula dan kelompok tani kelas lanjut sangat kecil (dibawah 50 %) dalam membantu memasarkan hasil panen. Terutama kelompok tani kelas lanjut pemasaran hasil pertanian tanaman pangan sangat di dominasi oleh swasta dalam hal ini toke sebesar 71 %, hal ini sejalan dengan tingkat peminjaman modal usaha ketoke paling besar juga dari kelompok tani lanjut ini dibandingkan dengan kelompok tani madya yang ketergantungannya tidak lagi ke toke bisa memasarkan hasil pertanian tanamannya secara lebih bebas dan umumnya dipasarkan sendiri oleh kelompok tani madya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Uphoff (1986) dimana kegiatan-kegiatan pascaproduksi umumnya dilaksanakan oleh kelembagaan lokal dalam hal penyimpanan (pasca panen dan atau pasca pengolahan) pengolahan (secara manual dan atau dengan mesin), pengangkutan (untuk pengolahan, penyimpanan, dan atau penjualan) dan pemasaran (borongan dan atau eceran).

Diketahui sebesar 50 % kelompok tani madya memasarkan hasil secara sendiri (mandiri). Artinya dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin mandiri kelompok tani dalam memasarkan hasil pertanian tanaman pangan mereka. Cara ini dapat dilakukan kelompok tani madya karena kemandirian mereka dalam permodalan sehingga mereka tidak terikat dengan pihak eksternal, dengan terlebih dahulu melakukan survey harga ke beberapa pasar atau pengepul untuk mendapatkan harga jual tertinggi. Cara lain dilakukan kelompok tani adalah dengan memasarkan ke pihak swasta atau dalam usahatani jagung biasanya petani menyerahkan pemasaran hasil ke pengepul (toke). Cara ini banyak dilakukan responden kelompok tani lanjut dimana sebesar 70% memasarkan hasil panen mereka ke toke. Biasanya cara ini dilakukan karena ada keterikatan pembiayaan di awal dengan toke seperti pinjaman modal dan pinjaman saprotan.

Eriyanti (2019) menyebutkan penentuan harga oleh pedagang pengumpul memperlihatkan bahwa petani tidak memiliki posisi yang kuat untuk ikut menentukan harga jual jagungnya. Hal ini juga sesuai dengan salah satu rekomendasi dalam penelitian Mariyah (2008) bahwa pemerintah daerah perlu membina kelompok tani dalam hal penyediaan Praproduksi secara kolektif dan pemasaran hasil dengan menawarkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu

2. Sumber pembiayaan dalam kegiatan pascaproduksi

Kegiatan dalam proses pascaproduksi juga membutuhkan dukungan pembiayaan, terutama kegiatan panen hasil. Dari olah data ditemukan bahwa responden yang menggunakan modal sendiri sebanyak 23 orang (44 %) dan menggunakan modal sendiri ditambah dengan bantuan toke sebanyak 23 orang (44 %). Sisanya enam orang atau sekitar 12 % murni sepenuhnya menggunakan pembiayaan dari toke.

Selain sumber-sumber pembiayaan di atas, banyak sumber lain yang sebenarnya dapat diakses untuk sumber pembiayaan kerabat dan teman. Permodalan juga bisa diperoleh dari program-program pemerintah yang umumnya dalam bentuk barang sarana pascaproduksi pertanian (pembiayaan in-kind) yang disalurkan melalui kelompok tani (Wulandari, *et al.* 2017). Dalam penelitian ini bentuk pemerintah berupa Alsintan yang digunakan pada fase pascapanen antara lain: Power Tressher, Cornseller, Cornseller Mobile dan Rice Milling Unit.

Namun, tidak seperti bank komersial yang membutuhkan jaminan, permodalan yang berasal dari pemerintah dan beberapa pembeli besar mensyaratkan petani yang hendak mengakses permodalan harus bergabung pada suatu asosiasi petani atau kelompok tani. Maka, terkait penelitian ini, penting untuk memperhitungkan tata kelola pembiayaan usahatani berbasis Asosiasi kelembagaan kelompok tani atau korporasi usaha tani.

Terkait dengan sumber pembiayaan dalam kegiatan usahatani yang dilakukan petani, hasil analisis Handriyadi dan Wulandari (2017) menunjukkan bahwa keanggotaan kelompok tani membantu petani dalam meningkatkan kesempatan akses pembiayaan dari berbagai sumber pembiayaan. Dengan menjadi anggota kelompok tani, petani memiliki akses yang lebih baik terhadap kredit dari bank dan lembaga keuangan mikro, pembiayaan in-kind dari pemerintah yang disalurkan melalui kelompok tani dan pembiayaan dari pedagang. Temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya memotivasi petani untuk bergabung pada suatu kelompok tani untuk mendapatkan kesempatan lebih besar dalam mendapatkan pembiayaan dari berbagai sumber pembiayaan.

3. Pengelola sumberdaya pertanian tanaman pangan

Sumberdaya pertanian tanaman pangan yang bersumber dari kelompok tani, pemerintah, dan swasta dikelola oleh para pihak tersebut secara terpisah sesuai dengan kesepakatan atau peraturan yang berlaku didalam kelompok, pemerintah atau swasta tersebut.

a. Pengelola sumberdaya pertanian tanaman pangan dari kelompok tani

Kelompok tani melalui kesepakatan bersama dalam memperoleh sumberdaya pertanian khususnya pupuk bersubsidi di urus oleh pengurus kelompok tani mulai dari menyusun Rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK) sampai dengan mendistribusikan pupuk bersubsidi tersebut melalui kios. Pupuk bersubsidi kelompok tani yang dititipkan dikios ditebus oleh anggota kelompok tani secara perorangan mengambilnya dikios pupuk. Permasalahan yang ditemui dilapangan adalah keterbatasan kas kelompok tani untuk menebus pupuk bersubsidi mengakibatkan modal penebusan ke distributor tersebut ditanggulangi oleh kios yang pada akhirnya kios menjual melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah, sebagian besar pemilik kios pupuk bersubsidi ini adalah toke. Dalam hal permodalan ini sebaiknya kelompok tani memupuk modal dari anggota sendiri sehingga harga bisa lebih murah atau sesuai dengan harga HET yang sudah ditetapkan oleh pemerintah

Bantuan permodalan berupa hibah uang dari pemerintah seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) dapat digunakan sebagai modal usahatani kelompok tani penerima manfaat program PUAP ini dan dapat mengatasi permasalahan pengadaan pupuk bersubsidi. Seperti dana PUAP yang dikelola oleh Gapoktan Albasiko.2 dikecamatan kinali telah berhasil membantu anggota kelompok tani untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan anggotanya dalam berusaha tani bahkan juga memfasilitasi anggotanya untuk kebutuhan harian mereka. Saat penelitian dilaksanakan modal awal yang diberikan pemerintah dari dana PUAP sebanyak seratus juta rupiah sekarang sudah berkembang lebih dari tiga puluh miliar rupiah.

b. Pengelola sumberdaya pertanian tanaman pangan dari pemerintah

Pemerintah cukup banyak memfasilitasi kelompok tani dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya pertanian tanaman pangan di kabupaten Pasaman barat khususnya dikelola atau difasilitasi oleh dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan kabupaten Pasaman Barat (DTPHP).

Dari hasil pengumpulan data sekunder diperoleh data sumber daya pertanian berupa bantuan dari pemerintah di kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2021 ada sebanyak lima belas jenis.

Sumberdaya pertanian yang dikelola atau difasilitasi oleh DTPHP ini mulai dari Imfrastuktur seperti bantuan Jaringan Irigasi Desa, Jaringan Irigasi Tersier, Jalan Usaha tani, Cetak sawah baru dan lain – lain sebagaimana sudah dijelaskan diatas pada point 2 tentang jenis sumberdaya pertanian. Pengelolaannya dilakukan secara bertingkat mulai dari penyuluh pertanian (tingkat jorong/nagari), Balai Penyuluhan Pertanian (tingkat kecamatan sampai ke DTPHP (Tingkat Kabupaten) sebagai leading sektornya.

c. Pengelola sumberdaya pertanian swasta

Swasta yang berperan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian di kabupaten Pasaman barat adalah toke yang memfasilitasi kelompok tani mulai dari sprotan, alsintan, bahkan pinjaman modal. Toke dalam memfasilitasi kelompok tani melalui kios sprotan, transportasi pengangkutan hasil produksi, gudang penanganan paska panen, dan pemasaran hasil pertanian. Jadi dari hulu sampai hilir dikelola atau difasilitasi oleh toke.

Dukungan sumberdaya pertanian tanaman pangan yang dikelola oleh swasta atau toke khususnya ditingkat kelompok tani responden dapat dibandingkan dengan kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), dan koperasi. Secara lebih rinci peran masing-masing pihak dapat kita lihat pada tabel 22.

Kemandirian pembiayaan lebih terlihat pada kelompok tani pemula dengan 75 persen pembiayaan usahatani dibiayai sendiri, halini bertolak belakang dengan kelompok tani madya yang sumber pembiayaannya 60 persen adalah dari koperasi, poktan, gapoktan dan toke, hanya 20 persen yang dibiayai sendiri. Setelah diperoleh informasi dari wawancara mendalam hal ini ternyata disebabkan oleh kelompok tani madya cenderung memanfaatkan bantuan pinjaman modal dari pemerintah seperti dana PUAP yang hanya diberikan kepada Gapoktan dan belum dibagikan kepada kelompok tani pemula, dan sebagian anggotanya adalah kelompok tani pada kelas lanjut.

Kecendrungan menggunakan dana PUAP yang dikelola oleh Gapoktan dengan badan hukum koperasi ini disebabkan oleh persyaratan yang mudah dan pertanggung jawabannya secara umum belum mengandung resiko sehingga banyak penerima dana PUAP ini yang tidak mengembalikan pinjamannya, terbukti dari hasil penelitian ini di Kabupaten Pasaman Barat dari 60 Gapoktan penerima PUAP (masing-masing seratus juta rupiah) sampai saat penelitian ini dilaksanakan hanya tinggal dua Gapoktan saja yang dananya berkembang melebihi seratus juta dan satu Gapoktan menyisakan dananya sekitar tujuh ratus juta rupiah, sedangkan sisanya 53 Gapoktan lainnya sudah tidak aktif lagi dan dananya menjadi kredit macet.

d. Tatacara Memperoleh

Permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan pertanian terkait dengan kondisi kelembagaan petani selama ini, yaitu lemahnya sistem organisasi petani dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya perdesaan, sehingga sulit menyentuh kebutuhan petani yang sebenarnya.

e. Tatacara Penggunaan

Tatacara penggunaan dukungan sumberdaya pertanian dapat diartikan sejauhmana pemanfaatan sumberdaya yang diberikan untuk menunjang kegiatan usahatani yang dilakukan petani. Aspek ini dinilai penting untuk melihat pemahaman petani dan manajemen dukungan yang diberikan. Tata kelola ini memberi peran signifikan pada keberlangsungan usahatani utamanya dalam hal menentukan margin keuntungan.

f. Tatacara Pengembalian

Relevansi tatacara pengembalian dengan tata kelola pembiayaan beririsan dengan sejauhmana petani dapat menyesuaikan modal yang dikeluarkan dengan pendapatan dari hasil usahatani yang dilakukan. Artinya, petani harus mampu mengkalkulasikan pembiayaan yang didapat dengan tata cara pengembalian. Dengan memahami bagaimana tatacara dan prosedur pengembalian, maka petani juga memahami berapa selisih yang didapat sehingga petani dalam kegiatan usahatannya dapat dikatakan memperoleh keuntungan. Beberapa parameter yang terkait dengan indikator tatacara pengembalian ini antara lain waktu pengembalian pinjaman, ketepatan waktu pengembalian, prosedur pengembalian dan kesesuaian jumlah pengembalian dengan jumlah pinjaman yang diperoleh.

Simpulan

Dari hasil penelitian ini maka dapat dipaparkan beberapa kesimpulan terkait tata kelola sumberdaya pertanian dalam kegiatan usahatani berbasis kelembagaan kelompok Tani Tanaman Pangan. Tata kelola sumberdaya pertanian tanaman pangan membutuhkan beberapa hal yaitu, (1) sumberdaya dengan melibatkan berbagai pihak. Kelompok tani kelas madya lebih banyak membantu anggotanya dalam memperoleh sumberdaya pertanian dibandingkan kelompok tani kelas lanjut, dan kelompok tani kelas lanjut lebih banyak membantu anggotanya dalam memperoleh sumberdaya pertanian. Artinya semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin baik tatakelola sumber daya pertanian tanaman pangan di tingkat kelompok tani di Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini sesuai dengan preposisi penelitian ini bila semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin baik kelompok tani tersebut dalam mengelola sumber daya pertanian di Kabupaten Pasaman Barat. Bila semakin tinggi kelas kelompok tani maka semakin banyak menerima bantuan program-program dari pemerintah. (2) Petani yang mempunyai luas lahan kategori sempit cenderung memanfaatkan toke atau pengepul dalam kegiatan usahatani mereka. Sementara, petani yang memiliki lahan dengan kategori luas cenderung menggunakan lembaga keuangan seperti bank dan koperasi.

Referensi

- Dzikrillah, GF. 2017. Analisis Keberlanjutan Usahatani Padi Sawah Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Anantanyu, S. 2009. Partisipasi Petani dalam Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Petani (Kasus di Provinsi Jawa Tengah) [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Yustika, AE. 2013. Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Reed, E. 1979. Two Approaches to Cooperation in Rice Production in South Korea dalam Group Farming in Asia. Editor John Wong. Singapore University Press. Kent Ridge, Singapore.

- Slamet, M. 2003. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Perdesaan dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan. Penyunting Ida Yustina dan Ajad Sudradjat. IPB Press. Bogor.
- Suryana, A. 2007. Strategi dan Program Revitalisasi Pertanian. Pidato Kunci Seminar Nasional dalam Rangka Dies Natalis ke-31 UNS, 13 Maret 2007.
- Marimin, Maghfiroh, N. 2010. Aplikasi Teknik Pengambilan Keputusan dalam Manajemen Rantai Pasok. Ed ke-3. Bogor: IPB Press.
- Padangaran AM. 2013. Analisis Kuantitatif Pembiayaan Perusahaan Pertanian. Bogor: IPB Press.
- Wulandari, E., Meuwissen, M., Karmana, MH., Oude, LA. 2017. Performance and access to finance in Indonesian horticulture. *British Food Journal*, Vol. 119, No. 3, hlm. 625-638.
- Sadono, Dwi. 2012. Model Pemberdayaan Petani dalam Pengelolaan Usahatani Padi di Kabupaten Karawang dan Cianjur, Provinsi Jawa Barat [disertasi]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Handriyadi, I., Wulandari, E. 2017. Keanggotaan Kelompok Tani dan Kaitannya dengan Akses Terhadap Sumber Pembiayaan Usaha Tani Pisang di Kabupaten Cianjur. *AGRICORE-Jurnal Agribisnis dan Sosial Ekonomi Pertanian*, Vol. 2, No. 2, Desember 2017, hlm. 291-357.
- Mariyah. 2008. Pengaruh Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat terhadap Pendapatan dan Efisiensi Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Penajam Paser Utara Kalimantan Timur [tesis]. Bogor: Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Eriyanti, F. 2019. Pemberdayaan Petani Jagung Oleh Stakeholders Di Nagari Kataping Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman. *Journal of Education on Social Science*. Vol. 3 No. 2 October 2019, hlm. 31-44.
- Uphoff, N. 1986. *Local Institution Development: Analytical Sourcebook with Cases*. Connecticut, USA: Kumarian Press.
- Wijaya, IKA. 2017. Kajian Tentang Pengelolaan Gulma Padi Sawah di Subak Cepik, Desa Tajen, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Naskah Publikasi. Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Udayana.
- Zainal, VR, Ramly, M., Mutis, T., Arafah, W. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Depok: Raja Grafindo.
- Kasmir, 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Brigham, EF, Gapenski, LC. 1991. *Financial Management Theory and Practice*. Orlando: The Dryden Press.
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. 2016. *Blueprint Pembiayaan UMKM 2015- 2019*.
- Sukardi. 2019. The Loan Against the Partnership Effect on Product Price (The Cause of Price Increase: A Theoretical View). *J Teknol Ind Pertan*. Vol. 29, No. 3, hlm. 290-298.
- Orgianus, Y. 2005. Model Bagi Hasil Pembiayaan Usaha Syariah, Solusi Mengatasi Kekurangan Sumber daya. *J Mimb*. XXI No.1:127-141.